BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akan dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian. Dimulai dari pengertian secara umum, pengertian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, serta menjelaskan tentang model dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan. Tidak semua pengangguran termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu, karena ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum mendapatkan pekerjaan. Sukirno (2006). Pengangguran juga disebabkan oleh ketidak-seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Pengangguran termasuk salah satu masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Kebanyakan orang apabila kehilangan pekerjaan merupakan penurunan standar kehidupan, jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan atau bahkan dipermasalahkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang

seringkali membahas bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw 2000).

2.1.1.1 Jenis - jenis Pengangguran

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya Sukirno (2006).

a. Pengangguran Normal Atau Friksional

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak tiga persen dari seluruh jumlah tenaga kerja maka ekonomi tersebut sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Tidak mempunyai pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tapi sedang mencari pekerjaan yang menurut mereka lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran akan rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha sukar memperoleh pekerja, maka dari itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi, ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses pencarian kerja ini, sementara para pekerja baru tersebut termasuk sebagai penganggur. Mereka inilah yang tergolong sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan tetap. Adakalanya dimana permintaan agregat lebih tinggi, ini akan mendorong para pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja digunakan maka pengangguran semakin berkurang. Akan tetapi pada waktu lainnya permintaan agregat menurun.

Penurunan permintaan agregat ini berakibat pada perusahaan yang kemudian akan mengurangi jumlah pekerja atau bahkan menutup perusahaannya, akibatnya pengangguran bertambah. Pengangguran inilah yang disebut dengan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan berbagai perusahaan di dalam suatu perekonomian akan terus berkembang maju, akan tetapi sebagiannya mengalami kemunduran. Kemerososotan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya barang baru yang lebih baik, majunya teknologi, pengurangan permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi, dan ekspor produksi industri menurun karena persaingan yang lebih serius di negara-negara lain. Kemerosotan ini akan berdampak pada kegiatan produksi di industri, sebagian pekerja akan terpaksa diberhentikan, dan berakibat pada peningkatan pengangguran. Pengangguran ini yang disebut pengangguran struktural, karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam membersihkan perkebunan sawah dan lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja seperti memotong rumput, membersihkan kawasan dan memungut hasil, sedangkan di pabrik-pabrik adakalanya pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Pengangguran

yang disebabkan oleh penggunaan mesin kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya yaitu:

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini disebabkan oleh pertumbuhan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Akibat dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan pekerjaan, jadi menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka juga akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dan dari peningkatan kemajuan teknologi yang mengurangi pengunaan tenaga kerja atau akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

Dalam konsep *labor force approach* disebutkan angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang/ingin mencari pekerjaan dalam pengertian ekonomi disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*). Sebagai indikator biasanya menggunakan persentase terhadap angkatan kerja dengan rumus:

$$OU = \frac{U}{Ak} x100\%$$

Dimana:

OU : Tingkat pengangguran terbuka

U : Jumlah penduduk yang ingin/sedang bekerja

Ak : Angkatan kerja

b. Pengangguran tersembunyi

Kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Antara lain faktor yang dipertimbangkan adalah besar kecilnya suatu perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Banyak negara berkembang seringkali ditemukan jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang dibutuhkan supaya dapat menjalankan kegiatan secara efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan termasuk dalam golongan pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini biasanya terjadi disektor pertanian atau jasa.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran bermusim biasanya terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Seperti contoh pada musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Apabila mereka tidak melakukan pekerjaan pada waktu itu, maka pengangguran ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah menganggur

Migrasi dari desa ke kota biasanya sangat pesat pada negara-negara berkembang. Akibatnya tidak semua orang yang bermigrasi ke kota dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan. Sebagiannya terpaksa menganggur sepenuh waktu. Selain itu ada yang tidak menganggur, namun tidak pula bekerja dengan sepenuh waktu karena dana jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya dua hari dalam seminggu. Pekerja yang mempunyai masa kerja ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

Untuk mengatasi masalah pengangguran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, ada tiga pertimbangan utama yaitu:

- Menyediakan lowongan pekerjaan
- Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
- Memperbaiki pembagian pendapatan, (Sukirno 2016).

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi pengangguran:

1. Angkatan kerja yang tidak memenuhi kriteria dari perusahaan atau dunia kerja
2. Pendidikan dan keterampilan rendah sehingga kalah daya saing dan terisisihkan
3. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia
4. Kemajuan teknologi, sehingga banyak pekerjaan manusia yang telah tergantikan oleh teknologi
5. Kesulitan bertemu antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan.

2.1.1.3 Dampak Dari Pengangguran

Adapun dua dampak pengangguran yaitu:

Dampak bagi perekonomian negara:

1. Penurunan pendapatan perkapita
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang bersumber dari sektor pajak
3. Meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk biaya sosial
4. Bertambahnya utang negara

Dampak bagi masyarakat:

1. Beban psikologis dan psikis
2. Hilangnya keterampilan karena tidak digunakan untuk bekerja
3. Menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.

2.1.1.4 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia yaitu:

A. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah dari sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas agar menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Dalam pandangan klasik, pengangguran terjadi akibat mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena selanjutnya akan dapat diatasi dengan mekanisme harga. Gilarso (2004). Dalam Teori Klasik apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah yang dibayarkan akan turun dan mengakibatkan produksi perusahaan turun, ini akan berdampak pada permintaan tenaga yang terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat dari adanya keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Kelebihan tenaga kerja di pasar akan terserap oleh peningkatan tenaga kerja ini, apabila harga relatif stabil. (Tohar 2000).

b. Teori Keynes

Teori Keynes berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga

pertumbuhan ekonomi terhambat bukan akibat dari rendahnya produksi tetapi oleh rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak semuanya disebakan oleh mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, namun upah akan turun hal ini merugikan bukan menguntungkan, karena dengan menurunnya tingkat upah berarti akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang, yang akhirnya produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes mengusulkan campur tangan pemerintah dalam mempertahankan permintaan agregat supaya sektor pariwisata dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. (Soesastro H, dan Budiman, A 2005). Dari teori Keynes tersebut pemerintah hanya bertugas dalam menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan pekerjaan adalah sektor wisata. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat supaya daya beli masyarakat terjaga, dan mampu mengatasi pengangguran.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pembangunan. Fungsi dari indeks pembangunan manusia dan indikatornya menjadi salah satu cara untuk terlaksananya perencanaan dan pembangunan suatu negara yang lebih terarah dan merupakan solusi dalam mengatasi pengangguran karena merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS (2009) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah pada tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia mengukur dan menujukkan kemajuan program pembangunan di awal dan di akhir dalam satu periode tertentu dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan suatu ukuran dalam sebuah pembangunan manusia guna mengembangkan suatu negara yang masih berkembang demi tercapainya perekonomian yang stabil. Indeks pembangunan manusia yaitu ukuran capaian pembangunan manusia yang berlandaskan pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perhitungan dalam indeks pembangunan manusia sebagai indikator pembangunan manusia mempunyai tujuan penting, yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan dalam kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar. (Latifah, Rotinsulu, dan Tumilaar 2017).

Beberapa indikator yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (BPS 2017), yaitu:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidupnya. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

b. Indeks Pendidikan

Indikator yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Kedua indikator tersebut dimasukkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana "Lit" merupakan rasio penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan dalam paparan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah gambaran keterampilan yang dimiliki penduduk dan gambaran jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka melek huruf merupakan persentase usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

c. Indeks Standar Hidup Layak

Menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Adapun beberapa indikator dalam standar hidup layak yaitu dari jumlah yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan presentase penduduk miskin, dan PDRB riil per kapita.

2.1.2.2 Ukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia memiliki indikator penting sebagai penyusun indeks pembangunan manusia, yang disebut sebagai penyusun indikator

pembangunan manusia. (BPS 2018). Diantaranya yaitu: kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

Tabel 2.1 Indikator Pembangunan Manusia

No.	Indikator	Ukuran	Satuan	Definisi
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Kesehatan/ Umur panjang dan hidup sehat	Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Orang	Jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi baru lahir untuk bertahan hidup
2.	Pendidikan	Rata rata lama sekolah	Orang	Rata rata lamanya penduduk usia 25 tahun keatas yang telah menjalani pendidikan formal
		Harapan Lama Sekolah(HLS)	Orang	Lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa yang akan datang.
3.	Pengeluaran	Pengeluaran perkapita	Orang	Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara

Adapun cara menghitung indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut: Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Cara menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.1.2.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa manfaat Indeks pembangunan manusia yaitu:

a. Menyadarkan para pengambil keputusan agar fokus pada pencapaian pembangunan manusia, karena IPM bukan hanya diciptakan dalam pertumbuhan ekonomi melainkan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara.

b. Mempertanyakan beberapa pilihan dalam kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama, namun dapat memiliki IPM yang berbeda.
c. Memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya, dengan memperlihatkan kesenjangan diantara beberapa kelompok, maka akan lahir bermacam diskusi di berbagai negara untuk mencari dari mana sumber masalah dan bagaimana solusinya. (Soleha 2017).

2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Definisi pertumbuhan ekonomi

Menurut Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian negara secara berkelanjutan menuju keadaaan yang lebih baik selama suatu periode tertentu. Perubahan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa di masyarakat bertambah. Adanya pertumbuhan ekonomi ini maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dan barang akhir dan jasa-jasa (*final good services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai suatu pernyataan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara, yang diukur melalui presentasi pertambahan

pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi di negara berkembang, dengan kata lain istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan hanya tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tapi juga pada modernisasi dalam kegiatan ekonomi, misalnya pada usaha merombak sektor pertanian tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah dalam pendapatan.

2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas para ahli ekonomi karena mempunyai perhatian terhadap penyebab adanya kemakmuran dan kemajuan dari ekonomi disetiap negara. Dari pemikiran mereka tercipta beberapa konsep teori tentang pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2016). Ada empat teori pertumbuhan ekonomi, antara lain yaitu:

1). Teori pertumbuhan klasik, menurut pandangan para ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah stok barang-barang modal, jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Menurut dari pandangan klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2). Teori Schumpeter, teori ini menekankan tentang pentingnya peran perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menunjukkan bahwa para pengusaha termasuk golongan yang terus-menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi, inovasi ini pasti akan memerlukan investasi. Menurut Schumpeter investasi terdapat dua golongan, yaitu: penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Dua investasi ini akan membangun

perekonomian. Menurut Schumpeter, semakin tinggi kemajuan tingkat ekonomi maka akan semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi lambat. Pada akhirnya akan tercapai tingkat "keadaan tidak berkembang" atau *"stationary state*, tetapi berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai ketika tingkat pertumbuhan tinggi. Berbeda dengan pandangan klasik. Menurut pandangan klasik tingkat tersebut dapat dicapai pada waktu perekonomian yang berada kembali pada tingkat pendapatan yang subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

3). Teori Harrod-Domar, dalam menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi, teori ini bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) di dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan beberapa pemisalan sebagai berikut: barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, rasio modal produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya dan perekonomian terdiri menjadi dua sektor. Dalam teori Harrod-Domar tidak terlalu memperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila suatu ekonomi terdiri dari tiga sektor atau empat sektor. Dapat disimpulkan berdasarkan teorinya hal yang berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang banyak, yaitu pengeluaran pemerintah dan ekspor. Teori Harrod-Domar merupakan pelengkap analisis Keynesian. Analisis Keynesian memperhatikan persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4). Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, di dalam teori ini meninjau dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovist dan Solow bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Teori ini mengatakan faktor yang penting dalam mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi bukanlah dari pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja, namun faktor yang terpenting yaitu kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor yang dianggap sebagai sumber penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sukirno (2016) yaitu:

(1). Tanah dan kekayaan alam lainnya

(2). Jumlah dan kualitas dari penduduk dan tenaga kerja

(3). Barang-barang modal dan teknologi

(4). Sistem sosial dan sikap masyarakat

(5). Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

2.1.3.4 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP) tahun sekarang atau yang sedang berjalan dengan tahun sebelumya.

Laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno 2004):

$$G = \frac{PDRB_{t} - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} x100\%$$

Dimana:

G : Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_{t}$: PDRB ADHK pada suatu tahun

$PDRB_{t-1}$: PDRB ADHK tahun sebelumnya

2.1.4 Upah Minimum Regional

2.1.4.1 Definisi Upah Minimum

Upah adalah salah satu sarana para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 angka 30 dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Upah minimum adalah standar minimum dalam pemberian upah yang digunakan oleh pelaku industri atau perusahaan kepada pegawai pada lingkungan kerja. Adapun peraturan upah minimum diatur di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, bahwa upah minimum harus didasari oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melihat dan mempertimbangkan pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan

hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja untuk bisa hidup dengan layak secara fisik dengan waktu selama 1 bulan. KHL pada setiap provinsi berbeda, dan merupakan faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan pada jumlah UMR setiap provinsi. KHL ditentukan melalui survei dewan pengupahan. Adapun KHL terdiri dari pangan, papan, sandang, pendidikan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Perhitungan UMR telah diatur dalam PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015. Dalam perhitungan UMR ada dua variabel, yaitu tingkat inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah, UMR terdiri dari tiga komponen, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

2.1.4.2 Tujuan Pemberian Upah Minimum

Pemberian dan penentuan jumlah upah yang layak memliki beberapa tujuan. Secara umum tujuan pemberian upah sebagai berikut:

a. Memberikan Hak Karyawan

   Upah merupakan hak karyawan yang harus diberikan atas usahanya dalam bekerja. Sehingga dalam hal ini pemberian upah merupakan kewajiban setiap perusahaan kepada karyawannya.

b. Memberikan Rasa Keadilan

   Pemberian upah dalam penentuan besarnya kompensasi harus didasarkan pada kinerjanya. Penentuan upah dilakukan tanpa ada diskriminasi dan apa adanya sehingga akan memberikan rasa keadilan terhadap semua karyawan,

maka para karyawan akan semangat dan motivasi kerja karyawan akan meningkat.

c. Memperoleh Karyawan Berkualitas

Pemberian upah yang sesuai akan menarik pelamar yang berkualitas pada perusahaan. Pelamar yang memiliki kualifikasi yang paling tinggilah yang melamar. Sebaliknya jika upah tidak sesuai maka akan memperoleh karyawan yang tidak atau kurang berkualitas.

d. Mempertahankan Karyawan

Pemberian upah yang layak akan mengurangi terjadinya karyawan yang keluar, sehingga karyawan giat bekerja dan akan bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas kerjanya masing-masing.

e. Mematuhi Peraturan Pemerintah

Pemberian upah yang telah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah berarti mendukung program pemerintah, dengan mematuhi peraturan pemerintah maka akan terhindar dari sanksi yang ada.

f. Menghindari Konflik

Jika upah yang dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, layak dan wajar maka tidak akan menimbulkan konflik yang akhirnya merugikan perusahaan secara keseluruhan. (Kasmir 2006).

2.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1.5.1 Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 menyebutkan definisi modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman modal untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal dalam negeri begitu juga dengan menggunakan modal dalam negeri.

2.1.5.2 Manfaat PMDN

Adapun beberapa manfaat penanaman modal dalam negeri yaitu:

a. Menghemat devisa
b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
c. Mendorong kemajuan industri di dalam negeri.
d. Memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN

Beberapa faktor yang mempengaruhi PMDN:

a. Potensi dan karakteristik daerah
b. Budaya masyarakat
c. Pemanfaatan otonomi daerah secara proporsional
d. Peta politik baik daerah maupun nasional
e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal

f. Peraturan daerah yang menciptakan iklim kondusif dalam dunia bisnis dan investasi.

2.1.5.4 Syarat PMDN

a. Modal

Modal yang digunakan merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.

b. Pelaku Investasi

Negara dan swasta, pihak swasta terdiri dari orang maupun badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bidang Usaha

Semua bidang yang terbuka untuk swasta, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.

d. Perizinan dan Perpajakan

Dapat memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti izin usaha, lokasi, tanah, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus dan yang lainnya.

e. Batas Waktu Berusaha

Mengacu pada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.

f. Tenaga kerja

Wajib menggunakan tenaga ahli warga negara Indonesia, kecuali apabila jabatan tertentu yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Indonesia. Mematuhi ketentuan undang-undang ketenagakerjaan (karena merupakan hak dari karyawan). (Munawaroh dan Sugiono 2019).

2.1.6 Penanaman Modal Asing

2.1.6.1 Definisi Penanaman Modal Asing (PMA)

Definisi penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pengertian modal asing dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 menurut pasal 2:

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia. Selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Modal asing di dalam undang-undang tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi termasuk alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan dalam menjalankan

perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi harus dipergunakan di Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal dari luar negeri/asing baik dengan modal asing ataupun secara bersama-sama dengan penanaman modal dalam negeri.

2.1.6.2 Manfaat Penanaman Modal Asing

Manfaat penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang, antara lain:

a. Untuk menciptakan lapangan kerja.

b. Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat.

c. Sumber tabungan atau devisa. (Arsyad 2010).

2.1.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing

1. Produk Domestik Bruto

Semakin meningkat PDRB suatu negara maka pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga banyak lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka daya beli masyarakat meningkat, begitu juga dengan permintaan barang dan jasa, keuntungan perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan banyak investasi.

2. Tingkat inflasi

Fokus pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu melihat dari tingkat inflasi, karena dampak yang ditimbulkan oleh inflasi berpengaruh pada seluruh sektor perekonomian. Inflasi yang sangat berat akan menyebabkan iklim investasi memburuk, karena tingginya inflasi pertumbuhan ekonomi melemah dan daya saing menurun, hal ini dikarenakan saat inflasi tinggi maka biaya produksi akan meningkat.

3. Nilai tukar

Nilai tukar merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan mata uang asing dengan mata uang dalam negeri. Ada dua jenis nilai tukar yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal berbentuk surat berharga, sedangkan nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal dikalikan dengan harga barang domestik dibagi dengan harga barang asing. Peningkatan yang terjadi pada nilai tukar riil menyebabkan harga barang di dalam negeri cenderung meningkat dan harga barang luar negeri menjadi murah. Oleh karena itu jika kurs rendah maka masyarakat akan banyak membeli barang dalam negeri dibanding barang luar negeri sehingga permintaan barang akan meningkat, yang kemudian hal ini dapat mempengaruhi dan menarik investor untuk menanam modal.

4. Upah

Kenaikan upah menyebabkan biaya faktor produksi meningkat, sehingga harga barang meningkat, peningkatan ini berpengaruh pada kurangnya minat investor karena daya beli pemerintah menurun dan keuntungan yang diperoleh akan berkurang.

5. Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tarif pajak yang besar akan membebani para investor. Saat tarif pajak meningkat akan disertai dengan peningkatan biaya produksi dan perusahaan harus meningkatkan harga untuk tetap memperoleh keuntungan, namun hal ini akan meyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah.

2.1.6.4 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun) Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nirmala Mansur, Daisy Engka dan Steeva Tumangkeng (2014) "Analisis Upah Terhadap Pengaangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012"	Variabel Independen: Upah Variabel Dependen: Penganggura n	-	Data yang digunakan sebanyak 10 tahun (2003-2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa upah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran di Kota Manado.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2-Mei 2014
2.	Muhammad Nurcholis (2014) "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum IPM Variabel Dependen: Penganggura n		Berdasarkan hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.Variabe l pertumbuhan ekonomi dan upah	E-Jurnal Ekonomi Pemban gunan, Vol 12\ E-Jurnal Pembang unan, Vol 12 No.1 Juni2014 Ekonomi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014"			minimum berpengaruh negatif, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif, sedangkan untuk pengujian F hitung, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.	
3.	Nur Ravika Famala Sari (2016) "Pengaruh variabel Ekonomi Makro terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur tahun 2010-2014"	Variabel Independen: PMA PMDN Variabel Dependen: Penganggura n	Variabel Independen Pengeluara n pemerintah -PDRB	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB, UMK, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh siginifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan PMA tidak berpengaruh sigifikan terhadap penganggura terdidik di Jawa Timur.	Jurnal Ekonomi Pembang unan Vol.14, No.01 Juni 2016
4.	Moch Heru Anggoro (2015) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya"	Variabel Independen: Pertumbuha n Ekonomi Variabel Dependen: Penganggur an	Variabel Independen: Pertumbuha n angkatan kerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifkan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya yang berbanding terbalik atau berlawanan. Variabel pertumbuhan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. Sementara kedua variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja	Prodi Pendidika n Ekonomi, Jurusan Pendidika n Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universita s NegeriSur abaya. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya	
5.	Dwi Mahroji dan Iin Nurhasanah 2019 "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten"	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Penganggur an		Hasil analisis data panel pada menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran,	http://jurn al.untirta. ac.id/inde x.php/Eko nomi-Qu Vol. 9, No. 1, Apr 2019 p- ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314
6.	Elvana Astrid dan Soeharjoto Soekapdjo (2020) "Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing ,penanaman modal dalam negeri, terhadap tingkat pengangguran di Indonesia"	Variabel Independen: IPM PMA Variabel Dependen: Penganggur an	Variabel Independen: Inflasi	Hasilnya adalah inflasi berpengaruh positif dan signifikan, namun IPM dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Jumlah penduduk dan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X 319
7.	Riza Firdhania, Fivien Muslihatin ningsih (2017) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran	Variabel Independen: Upah IPM Pertumbuha n Ekonomi Variabel Dependen:	Variabel Independen: Jumlah penduduk Inflasi	Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Varibel inflasi, upah minimum,	Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 2017, Volume IV (1):117-121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	di Kabupaten Jember"	Penganggur an		dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Secara simultan hasil analaisis data menunjukkan jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.	
8.	M.Wardiansyah Yulmardi dan Zainul Bahri (2016) "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera"	Variabel Independen: Upah Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: Pengangguran		Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran tertinggi diperoleh Provinsi Bengkulu, sedangkan perkembangan tingkat pengangguran terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik tingkat upah maupun pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi-provinsi Se-Sumatera.	e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1220 (online)
9.	Arfan Poyoh Gene H. M.	-Variabel Independen	Variabel Independen	Hasil penelitian menunjukkan variabel Upah berpengaruh	Agri-Sosio

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kapantow Juliana R. Mandei (2017) "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penggangguran di Provinsi Sulawesi Utara"	Upah Variaebl Dependen: Penganggura n	:Inflasi PDRB	secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan masing- masing probabilitas 0.5619 (Inflasi) dan 0.3791	Ekonom i Unsrat, ISSN 1907–4298 ,Volume 13 Nomor 1A, Januari 2017: 55 – 66
10.	Suprianto Syaparuddin Siti Hodijah (2015) "Pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia"	Variabel Independen: PMA PMDN		Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) secara simultan dan parsial PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) secara simultan PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Namun, hanya sebagian PMDN yang berpengaruh signifikan.	Vol. 4 No. 1 (2015): e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembanguna n Daerah

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang masih sekarang belum terpecahkan. Pengangguran di Indonesia masih berfluktuasi dari tahun-tahun terakhir. Pengangguran dalam penelitian ini dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pengangguran diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kurang berkualitas sehingga tidak mampu, dan tersisih pada kompetisi pasar modern saat ini. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran dan penduduk miskin. (Latifah, Rotinsulu, Tumilaar 2017).

Adapun penelitian terdahulu menunjukkan hasil negatif. Hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif terdapat dalam penelitian Dwi Mahroji dan Iin Nurhasanah (2019) IPM akan mengurangi angka pengangguran yang ada. Semakin tinggi angka IPM maka pengangguran menurun. Namun jika tidak signifikan, ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap provinsi di Indonesia masih belum merata secara menyeluruh, dengan IPM yang tidak merata maka angka pengangguran tidak dapat ditekan.

Hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan pengangguran di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dalam mewujudkan pembangunan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Maka seharusnya dilakukan peningkatan pembangunan modal dan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat dalam golongan tenaga kerja dapat bersaing di pasar tenaga kerja modern. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah disertai

masyarakat. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia, maka akan terserap, dan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat sejahtera, dan tentunya perekonomian meningkat dan tingkat pengangguran menurun.

2.2.2 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah ekonomi jangka panjang. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satunya peningkatannya disebabkan oleh perubahan penggunaan faktor-faktor produksi yang senantiasa meningkat baik dari baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan Gross National Product (GNP) yang tinggi akan disertai oleh penurunan jumlah pengangguran. Terdapat hubungan terbalik diantara pertumbuhan GNP dan tingkat pengangguran (Hasyim 2017).

Untuk melihat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran, berdasarkan teori terdapat hubungan antara laju pertumbuhan riil dan perubahan tingkat pengangguran yang dikenal sebagai hukum Okun *(Okun's Law),* menemukan bahwa terdapat kaitan erat antara tingkat pengangguran dengan GNP riil. Hukum ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GNP riil, dimana laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menurunkan tingkat pengangguran dan apabila laju pertumbuhan yang rendah atau negatif maka akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin meningkat (Hasyim 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu Zulfa (2016) terdapat hubungan yang berbeda antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, ada hubungan positif maupun negatif. Hubungan yang negatif menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka dapat menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan hubungan yang positif, jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas produksinya maka pengangguran akan tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun penelitian Nurcholis (2014) menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Dapat dikatakan jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa tersebut akan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia dengan kata lain banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan akan mengurangi pengangguran, tetapi jika pertumbuhan ekonomi menurun maka akan mengurangi produksi barang dan jasa dengan demikian akan terjadi penurunan atau pengurangan kebutuhan sumber daya manusia yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Regional terhadap Pengangguran

Tingkat upah merupakan hal mendasar dalam dunia ketenagakerjaan dan mempengaruhi perekonomian. Apabila pada suatu wilayah besaran upah meningkat maka akan menarik minat para pekerja dan akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran. Begitu juga sebaliknya dengan turunnya nominal upah di suatu wilayah maka akan diikuti oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja karena

banyak yang memilih tidak bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan harapannya dan negatif antar upah dan pengangguran.

Upah berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat upah, maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi, dampaknya untuk melakukan efisiensi perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja hal ini berimbas pada tingginya tingkat pengangguran. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan merupakan kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw 2000).

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, dan apabila seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, maka seorang pekerja akan menolak mendapatkan pekerjaan dengan jumlah upah tersebut. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka berakibat pada tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efesiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja untuk mengurangi tingginya biaya produksi. Hal ini berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran.

2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pengangguran

Dalam pertumbuhan ekonomi investasi ikut ambil serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu tumpuan perekonomian di suatu negara, dengan adanya investasi maka akan banyak

industri baru yang didirikan. Semakin banyak investasi/penanaman modal maka banyak industri baru yang berdiri dan tentunya akan mampu menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Jika investasi dalam suatu negara rendah maka lapangan pekerjaan sedikit tentunya penyerapan tenaga kerja juga tidak begitu banyak. Semakin tumbuhnya angkatan kerja sedangkan penyerapan tenaga kerja terserap sedikit akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. PMDN ini merupakan kegiatan penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha dalam negeri dan dilakukan oleh para penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ini akan berdampak pada kemajuan industri dalam negeri, dan memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.2.5 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Pengangguran

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Negara Indonesia yang dilakukan oleh investor asing atau penanam modal asing, baik itu dengan modal asing sepenuhnya ataupun bersama-sama menanam dengan pemodal dari dalam negeri. Manfaat penanaman modal asing bagi negara Indonesia yang sedang berkembang adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dengan begitu banyak tenaga kerja yang terserap dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian Elvana Astrid, Soeharjoto Soekapdjo (2020) hubungan PMA dengan pengangguran mempunyai hasil negatif signifikan, PMA yang dilakukan di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah, banyak penanaman modal yang berorientasi padat karya,

sehingga tenaga kerja yang tersedia akan terserap dan dampaknya penurunan tingkat pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

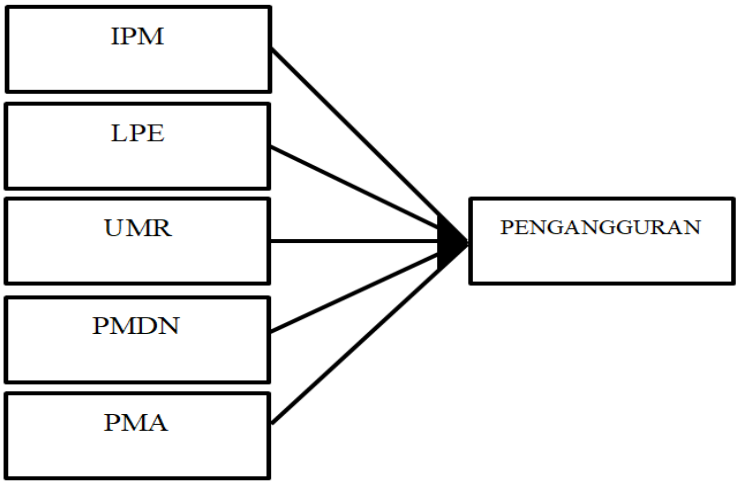

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atas hasil dari penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, secara parsial berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020
2. Diduga indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal

asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020.